



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 3508-3518

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Governabilitas Camat Dalam Percepatan Penurunan Angka Stunting Di Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende

Oktavianus Daluamang Payong

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat (STPM) Santa Ursula

Email: [viandpayong@gmail.com](mailto:viandpayong@gmail.com)

### Abstrak

Kecamatan Kotabaru merupakan salah satu kecamatan yang paling baik dalam mengatasi masalah stunting di Kabupaten Ende. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji governabilitas camat dalam percepatan penurunan angka stunting di Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil yang dari penelitian ini menunjukkan bahwa governabilitas camat dalam percepatan penurunan stunting di Kecamatan Kotabaru dilakukan dengan metode pendekatan berbasis masyarakat adalah dengan beberapa cara. Pertama, pendekatan kemitraan yakni camat menggandeng mitra dari NGO, kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat. Kedua pendekatan advokasi yakni adanya komunikasi persuasif dan koordinasi rutin yang dilakukan oleh camat kepada masyarakat melalui kepala desa. Ketiga pendekatan pemberdayaan yakni adanya bentuk kegiatan pemberdayaan seperti pelatihan, lokakarya dan adanya fasilitasi kerja sama antar desa dalam percepatan penurunan stunting. Keempat pendekatan swadaya yakni adanya intervensi dana desa dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Kecamatan Kotabaru.

Kata Kunci : Governabilitas, Camat, Stunting

## Abstract

Kotabaru District is one of the districts that is best at overcoming the stunting problem in Ende Regency. The aim of this research is to examine the governance of sub-district heads in accelerating the reduction of stunting rates in Kotabaru District, Ende Regency. The method used is descriptive research with a qualitative approach. Data collection was carried out through interviews, observation and documentation studies. The results of this research show that the governance of sub-district heads in accelerating stunting reduction in Kotabaru District is carried out using a community-based approach in several ways. First, the partnership approach, namely the sub-district head collaborates with partners from NGOs village heads, religious leaders, community leaders. The two advocacy approaches include persuasive communication and routine coordination carried out by the sub-district head with the community through the village head. The three empowerment approaches include forms of empowerment activities such as training, workshops and facilitating cooperation between villages to accelerate stunting reduction. The fourth self-help approach is village fund intervention to support the acceleration of stunting reduction in Kotabaru District.

Keyword: Governability, district heads, Stunting,

## PENDAHULUAN

Stunting merupakan salah satu masalah gizi yang fundamental, khususnya di Negara - negara terbelakang dan berkembang. Stunting merupakan bentuk ketidakberhasilan tumbuh kembang yang mengakibatkan gangguan pertumbuhan linear pada balita akibat dari akumulasi kekurangan nutrisi yang berlangsung lama, mulai dari masa kehamilan sampai usia 24 bulan. Kekurangan gizi pada masa pertumbuhan anak di usia dini akan menghalangi perkembangan fisik, meningkatnya kesakitan, menghalangi perkembangan mental anak, dan bahkan menyebabkan kematian. Balita yang mengalami masalah stunting rentan mengalami penurunan kemampuan intelektual, produktivitas, dan kemungkinan risiko mengalami penyakit degeneratif di masa mendatang (Norsanti, 2021).

Dasar kebijakan percepatan penurunan prevalensi *Stunting* di Indonesia diatur dalam surat Keputusan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan dan Pengurangan stunting dan Peraturan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional No. Pasal 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Kesuburan Indonesia 2021-2024.

Di Kabupaten Ende landasan kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Bupati Ende No. 79/KEP/HK/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Ende.

Tabel 1  
Data Jumlah Kasus Stunting Kabupaten Ende Pada Penimbangan Agustus 2021 dan Agustus 2022

No	Kecamatan	2021		2022	
		Jumlah Kasus	%	Jumlah Kasus	%
1	Nangapanda	159	12.0	117	8.0
2	Pulau Ende	92	16.3	52	9.2
3	Maukaro	138	24.0	126	20.6
4	Ende	66	10.9	59	10.6
5	Ende Tengah	47	4.3	47	4.7
6	Ndona	163	21.7	56	7.9
8	Wolowaru	118	10.5	59	5.5
9	Wolojita	96	25.3	88	22.8
10	Watuneso	178	26.1	118	18.3
11	Kelimutu	46	7.9	43	7.0
12	Ndori	85	22.5	60	15.3
13	Maurole	106	12.3	87	9.2
14	Kotabaru	211	35.8	27	4.6
15	Detukeli	68	12.3	38	6.7
16	Lepkes	96	17.5	83	16.0
17	Detusoko	144	31.5	85	15.3
18	Wewaria	104	7.9	84	5.8
19	Ende Utara	76	7.0	48	4.3
20	Ende Timur	46	5.1	19	2.8
21	Ende Selatan	87	4.3	78	3.9
Jumlah		2126	14.3	1374	8.9

Sumber : Data EPPGMBM Kab Ende 2022

Berdasarkan tabel temuan awal peneliti di atas prevalensi stunting Kabupaten Ende dengan kasus *stunting* paling sedikit berada di Kecamatan Ende Timur yang pada tahun

2021 persentasenya 5,1% dan pada penimbangan 2022 turun menjadi 2,8%. Kecamatan dengan prevalansi capaian terkecil adalah Kecamatan Wolojita yang pada penimbangan bulan Agustus 2021 sebesar 23,3% dan hanya mengalami penurunan sebesar 0,5 % menjadi 22,8% pada penimbangan Agustus 2022. Sedangkan Kecamatan dengan prevalensi penurunan *stunting* paling besar berada di Kecamatan Kota Baru yakni pada penimbangan Agustus 2021 sebesar 35,8% dan pada penimbangan Agustus 2022 mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi 4,6%. Kecamatan Kotabaru merupakan Kecamatan dengan capaian paling baik dalam penurunan angka *stunting* dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Ende (EPPGM, 2022).

Keberhasilan penurunan *stunting* di Kecamatan Kotabaru tentunya tidak terlepas dari peran semua pihak. Salah satu pihak tersebut salah adalah Camat. Capaian ini tentunya tidak terlepas dari metode atau strategi yang dilakukan oleh tim percepatan penurunan *stunting* di tingkat kecamatan. Keberhasilan Kecamatan Kotabaru dalam menurunkan angka *stunting* di wilayahnya tentunya didukung oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah terkait governabilitas dari Camat Kotabaru dengan menggunakan pendekatan berbasis masyarakat.

Teori yang menjadi rujukan penelitian ini adalah governabilitas. Governabilitas berkaitan dengan otoritas, kapabilitas atau kemampuan dari pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi (Kooiman, 2016). Untuk menganalisis keberhasilan Kecamatan Kotabaru dalam menurunkan angka *stunting* dengan metode pendekatan berbasis masyarakat yakni prinsip kemitraan, advokasi, pemberdayaan dan swadaya.

Governabilitas merupakan istilah yang banyak digunakan oleh para peneliti sejak tahun 1970an. Konsep ini digunakan oleh Huntington, Crozier dan Watanuki untuk menjelaskan kondisi pemerintahan dan demokrasi di Eropa, Amerika dan Jepang pada saat itu. Mereka menjelaskan ketidakpuasan masyarakat terutama disebabkan oleh melemahnya fungsi badan pemerintahan demokratis di negara-negara tripartit (Eropa, Amerika dan Jepang). Mereka menyebut kemerosotan ini sebagai krisis tata kelola pemerintahan, dimana mesin demokrasi tetap berfungsi, namun kemampuan mereka yang mengoperasikan mesin tersebut untuk mengambil keputusan semakin berkurang (Anggelina, 2022).

Mengutip Kooiman, governabilitas adalah kemampuan untuk memerintah. Lebih spesifiknya Kooiman menjelaskan governabilitas sebagai suatu proses penyeimbangan yang terus-menerus antara dua hal, yaitu kebutuhan dan kemampuan. Menurutnya, kebutuhan

dan keterampilan melibatkan komunikasi dan saling ketergantungan. Misalnya hubungan antara Camat dan kepala Desa meskipun lebih kepada hubungan koordinatif tetapi ada hal ketergantungan dalam proses pengambilan kebijakan. Governabilitas menyarankan integrasi tiga komponen utama yaitu masyarakat, pemerintah dan hubungan antara keduanya. Artinya hubungan antara kebutuhan (masalah) dan peluang (solusi) melibatkan interaksi dan dinamika. (Kooiman, 2016).

Secara esensial, jantung dari government making (Perbuatan Pemerintah) adalah governabilitas. Inisiasi kepemimpinan dan institusionalisasi struktur merupakan bagian dari kapasitas dan otoritas. Governabilitas berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam menggunakan otoritas, kewenangan dan kekuasaannya untuk mempengaruhi masyarakat dalam menjalankan pemerintahannya. (Eko, 2021) Camat bukanlah kepala pemerintahan yang memiliki otoritas politik dalam suatu wilayah. Namun dalam hal ini, camat dapat menjalankan governabilitas berdasarkan tugas koordinasi yang diberikan oleh pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan tugas pemerintahannya. Governabilitas bersifat interaktif. Pelembagaan governabilitas menyalurkan hak dan kepentingan berbagai subyek sekaligus membatasi kekuasaan politik sehingga menyalurkannya ke dalam kewenangan, kekuasaan, kemampuan, tugas (responsibility) dan tanggung jawab (responsibility) (Eko, 2021).

Governabilitas kemudian menjadi salah satu bagian penting dalam mengenali otoritas, kapasitas, kapabilitas, tanggungjawab dan akuntabilitas pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayah kerjanya.

Penelitian sebelumnya telah dijalankan oleh (Norsanti, 2021) dengan judul "Efektivitas program Percepatan penurunan Stunting Di kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan (Studi Kasus Pada Desa Mampari dan Desa Banua Hanyar)" menjadi landasan dan referensi bagi penelitian ini. Penelitian ini sebelumnya sangat penting sebagai bahan perbandingan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam penelitian ini Norsanti menggunakan teori efektivitas.

Hasil penelitian Norsanti menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas program percepatan penurunan stunting di Kecamatan Batumandi terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung program ini adalah kerjasama yang baik antara petugas gizi dari UPT Puskesmas Batumandi, bidan desa, kader Posyandu dan kader PMT. Sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya adalah kurangnya

pendanaan, pendidikan orang tua, ekonomi keluarga balita stunting dan kurangnya sosialisasi tentang pola asuh anak.

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh penulis di atas memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan yakni berkaitan dengan penurunan stunting. Namun perbedaannya terletak pada teori dan pendekatan yang digunakan serta tempat penelitian, dan periode waktu yang berbeda. Tujuan penelitian penulis ini adalah untuk mengetahui kemampuan camat kecamatan dalam mempercepat penurunan angka stunting di Kecamatan Kotabaru Kabupaten Ende.

## METODE PENELITIAN

Di dalam penelitian ini, *research method* adalah deskriptif. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu unit sosial tertentu, dapat berupa individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat secara keseluruhan (Moleong, 2018).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh kedua-dua pihak di mana pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) akan memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Untuk memperoleh data, peneliti akan melakukan wawancara dengan para informan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun. Peneliti akan menggali informasi terkait dengan fokus penelitian dengan mewawancarai narasumber secara langsung berkaitan dengan percepatan penurunan *stunting* di kecamatan Kotabaru.

Teknik analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif model interaktif, yang terdiri dari pengumpulan data, kondensi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles et al., 2000).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran camat dalam mendukung program pemerintah daerah untuk menekan dan menurunkan angka *stunting* sangatlah penting. Sebagai ketua pelaksana di kecamatan ada beberapa tugas utama yang berkaitan dengan peran camat dalam menekan dan mengurangi angka *stunting* diantaranya sebagai berikut : mengkoordinir kegiatan pemberdayaan masyarakat; mengkoordinir penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati; membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; serta mengkoordinasikan

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan.

Dalam mendukung proses percepatan penurunan stunting tersebut, ada beberapa pendekatan yang dilakukan oleh camat. Pendekatan tersebut dimaksud agar rencana program dan kegiatan dapat terealisasi secara tepat. Salah satu bentuk pendekatan yang digunakan dalam mendukung percepatan penurunan stunting adalah pendekatan berbasis masyarakat. Pendekatan tersebut dibagi dalam beberapa bagian yakni :

#### 1. Kemitraan

Program berbasis masyarakat hanya akan berhasil bila seluruh pemangku kepentingan baik dari masyarakat, pemerintah, dan lembaga/LSM lainnya menjadi mitra dan terlibat. Berkaitan dengan percepatan penurunan angka stunting di Kecamatan Kotabaru, pendekatan kemitraan yang dilakukan oleh camat adalah dengan bekerja sama dengan mitra. Mitra tersebut adalah Puskesmas, Kepala Desa, Tokoh agama (Pastor Paroki), NGO MOMENTUM (*A Global Partnership For Health And Resilience*), Kaum Muda dan kelompok-kelompok masyarakat. Keberadaan mitra tersebut sangat membantu percepatan penurunan stunting di Kecamatan Kotabaru.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti di lapangan, melalui mitra para kepala desa, desa-desa di Kecamatan Kotabaru dijadikan sebagai desa siaga stunting. Melalui tokoh agama yang dalam hal ini pastor paroki kecamatan mengadakan kerja sama dengan memberikan materi terkait pencegahan stunting pada saat kursus persiapan perkawinan bagi umat katolik yang hendak menikah. Selain itu pada saat perayaan ekaristi pastor dalam khotbah menitipkan pesan terkait pencegahan stunting. Bagi Ibu hamil yang hendak melahirkan terlebih dahulu didoakan oleh pastor paroki.

Bentuk kerja sama dengan mitra NGO Momentum yakni Momentum hadir sebagai fasilitator yang mendukung program percepatan penurunan stunting. Kegiatan yang difasilitasi yakni lokakarya dan pendampingan bagi para kepala desa pembuatan peraturan bersama kepala desa dan kegiatan fasilitatif lainnya. Selain itu kaum muda dan kelompok masyarakat di kecamatan melalui desa digerakan dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas kesehatan.

#### 2. Advokasi

Advokasi berkaitan dengan serangkaian kegiatan komunikasi untuk memengaruhi penentu kebijakan demi mendapatkan suatu dukungan. Berdasarkan hasil wawancara bersama para narasumber dijelaskan bahwa bentuk advokasi yang dilakukan di kecamatan Kotabaru yakni dengan melakukan komunikasi persuasif kepada para kepala desa dan mitra yang bekerja sama. Bentuk komunikasi tersebut dilakukan baik dalam

bentuk koordinasi kebijakan maupun dalam merespon kebutuhan yang ada di desa. Camat menggunakan kewenangan koordinasi sebagai bentuk advokasi dalam mendukung percepatan penurunan angka *stunting* di Kecamatan Kotabaru. Selain itu Camat melakukan koordinasi kepada kepala desa yang dalam hal cakupan wilayah yang agak sulit dijangkau karena kondisi jalan yang rusak yakni di desa Hangalande, Liselande, Tiwusora dan Pise. Aksi nyata advokasi yang dilakukan dari empat desa tersebut yakni pembuatan peraturan bersama kepala desa tentang pemanfaatan AMMDes (Alat Mekanis Multiguna Pedesaan). Dengan Perdes ini diadakan satu mobil ambulans bersama untuk membantu masyarakat yang kesulitan untuk melakukan kontrol kesehatan ke Puskesmas.

### 3. Pemberdayaan

Tujuan dari pemberdayaan adalah untuk meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam mengatasi masalah *stunting* (Munawaroh et al., 2020).

Berdasarkan hasil wawancara bersama para narasumber bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh camat Kotabaru dalam percepatan penurunan *stunting* antara lain dengan melakukan kegiatan pembentukan dan pelatihan jejaring desa siaga di tahun 2022 di Desa Pise, Desa hangalande, Desa Liselande dan Desa Tiwusora. Melalui NGO *Momentum* camat melakukan kegiatan lokakarya *Mapping Community Engagment* yang melibatkan seluruh desa di Kecamatan Kotabaru. Memfasilitasi proses pembentukan Badan Kerja Sama Antar Desa untuk mendukung pemanfaatan AMMDes serta mewajibkan dan memfasilitasi seluruh desa untuk menetapkan peraturan desa tentang kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir (Kibla).

Berdasarkan bentuk pemberdayaan tersebut capaian penurunan angka *stunting* setiap tahun mengalami penurunan yang cukup signifikan. Data hasil penimbangan tahun 2021 tercatat angka *stunting* sebesar 35,8% dan mengalami penurunan di penimbangan tahun 2022 menjadi 4,6%. Hal ini karena keterlibatan dan peran serta aktif dari masyarakat dalam mendukung penurunan *stunting* di wilayah tersebut.

### 4. Swadaya

Swadaya adalah kemampuan dari seseorang, kumpulan orang atau masyarakat dalam mengelola potensi atau sumber daya yang ada dalam masyarakat tersebut. Dalam hal ini pendekatan swadaya yang dilakukan oleh camat Kotabaru dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* adalah dengan menggerakkan semangat dan memfasilitasi masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada di Kecamatan Kotabaru.

Berdasarkan hasil wawancara bersama para narasumber bentuk swadaya yang

dilakukan dalam percepatan penurunan stunting antara lain, ada intervensi anggaran dana desa dalam APDes 2022 dan RKPDDes 2023 setiap desa untuk menjadikan pencegahan stunting, AKI, AKB sebagai program prioritas. Bentuk swadaya melalui intervensi dana desa ini menjadikan desa lebih aktif dalam kerja menurunkan stunting. Dengan kerja swadaya ini sumber daya, potensi dan komponen yang dimiliki oleh masyarakat dengan sendirinya akan digerakan. Dana desa sebesar 14% dialokasikan untuk percepatan penurunan stunting dengan fokus kegiatannya adalah alokasi Pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil KEK dan balita, mengadakan kegiatan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan untuk para kader Posyandu di setiap desa, dana untuk pemberian insentif bagi tenaga kesehatan desa dan kader Posyandu.

Selain itu bentuk pendekatan swadaya yang dilakukan adalah dengan melibatkan tokoh agama yakni pastor paroki (Imam katolik yang memimpin satu wilayah paroki) dengan mengundang petugas kesehatan untuk memberikan pendidikan pencegahan stunting di setiap acara kursus persiapan perkawinan begitu pula dalam khotbahnya di gereja pastor paroki ikut menyuarakan terkait pencegahan stunting. Selain tokoh agama adapula keterlibatan tokoh masyarakat, kaum muda dan masyarakat umum dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan stunting. Pendekatan swadaya masyarakat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam percepatan penurunan stunting di Kecamatan Kotabaru.

#### SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh, governabilitas Camat Dalam Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Di Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, camat dengan governabilitas yang dimiliki melakukan kerja sama dengan mitra atau koordinasi lintas sektor untuk melakukan pencegahan dan penurunan *stunting*. Bentuk aksi nyata yang dilakukan adalah melakukan rapat koordinasi setiap bulan di setiap desa dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, serta tokoh wanita dalam rangka penguatan kapasitas dan keterlibatan semua pihak; kerja sama dengan pastor paroki dengan memasukan materi kesehatan ibu dan anak dalam kursus persiapan perkawinan; dan kerja sama dengan pastor paroki Kotabaru untuk mendoakan dan upacara pemberkatan ibu hamil.

Kedua, Camat dengan governabilitas yang dimiliki memengaruhi desa dalam mengintervensi anggaran dana desa untuk mencegah dan menurunkan stunting. Aksi nyata yang dilakukan adalah memberikan alokasi dana desa untuk PMT Ibu Hamil, KEK, bayi dan Balita bekerja sama dengan tenaga kesehatan setiap desa; memberikan alokasi dana desa untuk kegiatan sosial, pelatihan dan pendampingan untuk para kader posyandu di setiap desa; mengalokasikan dana untuk pemberian insentif bagi tenaga kesehatan desa dan kader Posyandu; merencanakan dalam RKPDDes 2023 setiap desa untuk menjadi desa siaga dengan dukungan alokasi dana yang maksimal; mengalokasikan dana operasional untuk Tim AMMDes yang telah dibentuk (ATK, insentif, penjemputan ibu hamil, lumsun perjalanan dinas, dan BBM) untuk pelayanan kesehatan ibu hamil (penjemputan ibu hamil ke fasilitas kesehatan dan pelayanan untuk USG di Fkses).

Ketiga, governabilitas camat dalam Pembentukan desa siaga sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam pencegahan stunting. Aksi nyata yang dilakukan adalah pembentukan desa siaga untuk empat desa yang memiliki jumlah *stunting* terbanyak yakni desa Pise, Desa Hangalande, Desa Liselande dan Desa Tiwusora; dan pembentukan Peraturan bersama Kepala Desa tentang Pemanfaatan AMMDes (Alat Mekanis Multiguna Pedesaan) oleh empat desa yakni desa Pise, Desa Hangalande, Desa Liselande dan Desa Tiwusora.

#### DAFTAR PUSTAKA

Anggelina, R. (2022). Governabilitas Pemerintah Kalurahan Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Eko, S. Y. (2021). Government Making: Membuat Ulang Ilmu Pemerintahan.  
<https://jurnal.apmd.ac.id/index.php/governabilitas/article/view/109/49>

EPPGM. (2022). Dashboard SIGIZI Terpadu. Kemenkes.  
<https://sigiziterpadu.kemkes.go.id/ppgbm/index.php/Dashboard/>

Herdiana, D. (2019). Peran Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat. Jurnal Master Pariwisata (JUMPA), 63.

<https://doi.org/10.24843/JUMPA.2019.V06.I01.P04>

Kooiman, J. (2016). Interactive governance and governability. In *Critical Reflections on Interactive Governance: Self-organization and Participation in Public Governance* (pp. 29–50). *The Journal of Transdisciplinary Environmental Studies*.

<https://doi.org/10.4337/9781783479078>

Machmudi, M. I. Al. (2022). Diperlukan Inovasi Percepat Penurunan Stunting di Tanah Air. *Media Indonesia.Com*. <https://mediaindonesia.com/humaniora/537982/diperlukan-inovasi-percepat-penurunan-stunting-di-tanah-air>

Miles, M. B., Huberman, A. M., Rohidi, T. R., & Mulyarto. (2000). *Analisis Data kualitatif*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI -Press), 1992.

<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=298242>

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1133305>

Munawaroh, H., Syakur, M., Fitriana, N., & Muntaqo, R. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan Stunting Sejak Dini di Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 20(2), 231. <https://doi.org/10.21580/dms.2020.202.6654>

Murakata, R. (2010). RELAWAN MURAKATA: Pengertian dan Konsep Pendekatan Berbasis Masyarakat. <http://pmimurakata.blogspot.com/2010/11/pengertian-dan-konsep-pendekatan.html>

Norsanti, N. (2021). EFEKTIVITAS PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KECAMATAN BATUMANDI KABUPATEN BALANGAN (Studi Kasus Pada Desa Mampari dan Desa Banua Hanyar). *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 3(1), 10–21. <https://doi.org/10.20527/JPP.V3I1.3825>